

- a). Peningkatan fasilitasi pelayanan untuk kelancaran kehidupan keagamaan dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program peningkatan pelayanan kehidupan keagamaan;
 - (2). Program pembinaan lembaga sosial keagamaan.
- b). Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan ulama, kyai dan tokoh agama dalam meningkatkan harmonisasi serta kerukunan hidup umat beragama dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama
 - (2). Program peningkatan pelaksanaan syiar-syiar keagamaan.

2). Bidang Ketenagakerjaan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang ketenagakerjaan, yaitu :

- a). Peningkatan kualitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja dan wirausaha mandiri; peningkatan fasilitasi untuk penciptaan peluang kerja dan perluasan kesempatan kerja; serta peningkatan peranserta pelaku industri untuk mewujudkan harmonisasi hubungan industrial, dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja;
 - (2). Program perluasan dan penciptaan kesempatan kerja;
 - (3). Program peningkatan hubungan industrial yang harmonis.
- b). Peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, korban masalah sosial dan keluarga miskin, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program pemenuhan kebutuhan hidup kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keluarga miskin;
- (2). Program bimbingan dan fasilitasi untuk usaha mandiri

3). Bidang Kependudukan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang kependudukan, yaitu :

- a). Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan akte catatan sipil, dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan akte catatan sipil;
 - (2). Program pengembangan sistem administrasi dan dokumentasi kependudukan.
- b). Pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera, dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program optimalisasi pelayanan keluarga berencana;
 - (2). Program pengarahan mobilitas penduduk;
 - (3). Program bimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera.
- c). Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan segenap potensi masyarakat, dengan program sebagai berikut:
 - (1). Program pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan sarana dan prasarana desa;
 - (2). Program pendayagunaan potensi ekonomi desa;
 - (3). Program pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa;
 - (4). Program kesetaraan dan keadilan gender.

BAB V PENGUKURAN KINERJA

A. Penetapan Indikator Kinerja atau Tolok Ukur Kinerja

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil kerja dari suatu instansi pemerintah dihubungkan dengan tujuan, sasaran hingga ke visi dan misi yang harus diemban oleh organisasi yang bersangkutan. Kinerja dapat juga diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Prestasi dimaksud adalah tampilan organisasi dalam menjalankan kegiatan dan program kerjanya atau gambaran yang menunjukkan mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstranya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja dari pemerintah daerah. Dengan adanya indikator kinerja, pemerintah daerah mempunyai wahana yang jelas bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dikategorikan telah berhasil atau belum berhasil pada masa yang akan datang.

Terdapat 3 (tiga) macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, yaitu: ukuran kriteria tunggal; ukuran kriteria beragam dan ukuran kriteria gabungan. Ukuran kriteria tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan 1 (satu) tolok ukur,

sedangkan ukuran kriteria beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam tolok ukur untuk menilai kinerja organisasi. Hanya saja ukuran kriteria beragam harus diikuti dengan penentuan bobot dari tiap-tiap tolok ukur yang digunakan. Sementara itu, ukuran gabungan adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam tolok ukur sekaligus menghitung bobot masing-masing tolok ukur beserta rata-ratanya sehingga menjadi ukuran kinerja secara keseluruhan.

Dalam kerangka manajemen strategis, meskipun seluruh perencanaan strategis yang meliputi penentuan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan seluruhnya telah dibahas dalam dokumen Renstra, namun untuk kebutuhan pengukuran kinerja harus ditentukan atau ditetapkan indikator kinerja yang benar-benar relevan atau yang sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh organisasi perangkat daerah, kemudian selanjutnya dinilai dan dibahas bagi ukuran keberhasilan atau ketidakberhasilan dari pemerintah daerah tersebut. Penetapan indikator kinerja, umumnya didasarkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kinerja dimaksud, diperlukan indikator kinerja yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok indikator kinerja, yaitu : indikator masukan (inputs); keluaran (outputs); hasil (outcomes); manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Kelima indikator kinerja tersebut dalam penyusunannya terikat dalam suatu kerangka kerja logis (*logical frame work*) atau hirarki proses yang penilaiannya dimulai dari indikator masukan dan berakhir pada indikator dampak. Khusus untuk indikator proses, seringkali jarang digunakan meskipun hal tersebut sangat penting dan dibutuhkan untuk menilai suatu kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang sedang dilaksanakan. Selain itu, indikator proses merupakan ukuran yang paling

dominan untuk menilai kualitas proses pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, penetapan indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini pada beberapa kegiatan pelayanan akan dimasukkan indikator proses bersama-sama dengan indikator lainnya. Untuk memudahkan penilaian, maka tolok-ukur kinerja yang akan digunakan, yaitu, tolok-ukur kinerja berdasarkan indikator makro dan indikator mikro/ bidang kewenangan pemerintahan

B. Rencana Pencapaian Kinerja atau Tolok Ukur Kinerja

Penentuan rencana pencapaian kinerja atau tolok ukur kinerja harus dapat dikaitkan dengan kemampuan dan kesanggupan dari unit kerja atau organisasi perangkat daerah untuk merealisasikannya. Rencana pencapaian kinerja dimaksud harus menunjukkan kesinambungan dan konsistensi kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi menurut bidang kewenangan pada seluruh organisasi perangkat daerah yang pada akhirnya berakumulasi pada suatu ukuran indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan dari unit kerja atau organisasi perangkat daerah yang bersangkutan maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam dokumen Renstra ini telah ditentukan rencana pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Bogor yang menunjukkan rencana kinerja kumulatif dari seluruh bidang kewenangan, sedangkan indikator yang terangkum dalam masing-masing bidang kewenangan menunjukkan realisasi dari hasil kegiatan, program, kebijakan secara tersendiri dari masing-masing unit kerja menurut bidang kewenangannya. Rencana pencapaian kedua jenis indikator kinerja dimaksud akan digunakan untuk penilaian dan pertanggungjawaban kinerja tahunan (LPJ Akhir Tahun Anggaran) dan kinerja lima tahunan (LPJ Akhir Masa Jabatan) dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Rincian dari rencana pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1. Rencana Pencapaian Kinerja atau Tolok Ukur Kinerja
Pemerintah Kabupaten Bogor

INDIKATOR KINERJA	Situasi 2003	Rencana 2004 - 2008					
		2004	2005	2006	2007	2008	
1 MENURUT INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN							
A KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN MASYARAKAT							
1 Nilai PDRB							
a Harga Berlaku (Rp. Triliun)	13,99	15,39	16,93	18,62	20,48	22,53	
b Harga Konstan (Rp. Triliun)	5,126	5,638	6,201	6,821	7,503	8,253	
c Kontribusi Sektor/Lapangan Usaha Riil							
- Primer (%)	13,19	13,08	12,97	12,86	12,75	12,64	
- Sekunder (%)	56,66	56,86	57,06	57,26	57,46	57,66	
- Tersier (%)	30,15	30,06	29,97	29,88	29,79	29,70	
2 Pendapatan per Kapita atau PDRB per Kapita							
a Harga Berlaku (Rp. Jula)	3,81	4,10	4,43	4,77	5,15	5,55	
b Harga Konstan (Rp. Jula)	1,39	1,50	1,62	1,75	1,88	2,03	
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,46	4,91	5,36	5,81	6,26	6,71	

4	Tingkat Konsumsi dan Investasi Pemerintah Menurut Total APBD (Rp. Miliar)	632,049	849,399	878,852	910,244	943,643	979,226
B TARAFAF KESEJAHTERAAN RAKYAT							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Komposit	67,70	69,41	73,05	74,95	76,91	78,93
a	Indeks Pendidikan	75,72	76,00	76,28	76,56,	76,84	77,15
b	Indeks Kesehatan	70,37	71,08	71,79	72,51	73,23	73,96
c	Indeks Daya Beli	62,13	66,53	71,08	75,78	80,65	85,67
Komponen IPM							
a	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	66,80	67,22	67,65	68,51	68,94	69,38
b	Angka Melek Huruf (AMH) (%)	92,80	92,91	92,97	93,11	93,16	93,25
c	Rata-rata Lama Sekolah (RRSL) (tahun)	6,10	6,20	6,41	6,52	6,63	6,74
d	Kemampuan Daya Beli (PPP = Purchasing Power Parity)	550,44	568,84	607,58	627,94	648,97	670,71
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.671.451	3.744.880	3.819.777	3.896.172	3.974.095	4.053.576
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,28	2	2	2	2	2
4	Jumlah Pengangguran Terbuka (org)	67.316	60.584	54.526	49.073	44.166	39.745
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	55,50	57,15	58,80	60,45	62,10	63,75
6	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	445.730	440.160	434.590	429.020	423.450	417.880
II MENURUT INDIKATOR BIDANG KEWENANGAN							
A BIDANG ADM. UMUM PEMERINTAHAN							

Sekretariat Daerah													
1	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan												
	- Pengadaan tanah kantor kecamatan	35	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Pengadaan bangunan kantor kecamatan	35	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Pengadaan rumah dinas Camat	33	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	
	- Pengadaan bangunan kantor kelurahan	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Rehabilitasi Kantor Kecamatan	1	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Catur Tertib Pertanahan											
	- Sertifikasi Massal tanah masyarakat	1.200	800	1.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Identifikasi Status Tanah Ex HGU	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
	- Penyusunan Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Pemerintah Desa	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	-	0	23	74	52	140	140	140	140	140	140	
	- Fasilitas Pemilihan Anggota BPD	-	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Pembekalan bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa	-	306	240	240	240	240	240	240	240	240	240	

	- Fasilitas Perubahan desa menjadi Kelurahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Pembinaan dan Pengendalian Program Raksa Desa	55	55	55	55	55	55	55	55	55
4	Pembentukan dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah									
	a. Peraturan Daerah	20	25	20	20	20	20	20	20	20
	b. Keputusan	351	384	384	384	384	384	384	384	384
	c. Instruksi Bupati	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Perjanjian	14	18	18	18	18	18	18	18	18
	e. Penyebarluasan Produk hukum daerah									
	- Dinas, Badan, Kantor	175	70	70	70	70	70	70	70	70
	- Kecamatan	175	80	80	80	80	80	80	80	80
	- Kelurahan dan Desa	0	0	466	466	466	466	466	466	466
	- Masyarakat	125	125	125	125	125125	125	125	125	125
5.	Advokasi dan Perlindungan Hukum									
	a. Perkara Pidana	3	3	2	2	2	2	2	2	2
	b. Perkara Perdata	35	4	5	5	4	4	4	4	5
	c. PTUN	12	3	5	5	6	5	5	5	6
	d. Perkara Khusus	15	13	12	12	15	15	10	10	12
	e. Penanganan diluar Pengadilan	85	127	135	135	140	140	150	150	150
7.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Pembinaan Olahraga									

a. Perumusan Kebijakan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	0	1	0	1	0	1	0	1
b. Penyusunan Pola Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	0	1	0	1	0	1	0	1
c. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Kepemudaan	70	70	80	80	80	80	80	80
d. Pemilihan Pemuda Pelopor	6	6	6	6	6	6	6	6
e. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	25	40	40	40	40	40	40	40
f. Pelatihan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba Bagi Generasi Muda	70	80	80	80	80	80	80	30
g. Pengembangan Olah Raga Kemasarakatan	0	40	40	40	40	40	40	40
h. Pelatihan Instruktur Senam	0	50	40	40	40	40	40	40
i. Peringatan Hari Besar Nasional	11	11	11	11	11	11	11	11
j. Peringatan Hari Jadi Bogor	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Peningkatan Pelayanan dan Kerukunan Hidup Beragama								
a. Bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan								
- Masjid	426	447	468	489	510	531		531
- Musholla	852	894	926	968	1.000	1.042		1.042
- Pondok Pesantren	426	447	468	489	510	531		531
- Majelis Taklim	426	447	468	489	510	531		531

	- TPQ dan TPA	105	115	125	135	145	155
	b. Bantuan kelancaran ibadah haji dan penyelenggaraan MTQ/LPTQ						
	- Jemaah Haji	29	31	33	35	37	39
	- MTQ /LPTQ	84	84	84	84	84	84
	c. Peringatan Hari Besar Islam	6	6	6	6	6	6
	d. Penyelenggaraan Dialog Interaktif Intern dan antar umat beragama	1	1	1	1	1	1
	e. Penyelenggaraan Pengajian	32	32	32	32	32	32
	f. Sertifikasi Tanah Wakaf	0	30	30	30	30	30
	8. Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan						
	a. Penyelenggaraan Pembinaan DAI dan Mubalig	0	40	40	40	40	40
	b. Bantuan kepada Bazis Bogor	1	1	1	1	1	1
	c. Pembinaan kepada Pengurus DKM	0	80	80	80	80	80
	d. Pembinaan Pimpinan Fompes	0	50	50	50	50	50
	9. Pengendalian Penanganan Kesejahteraan Sosial						
	a. Bantuan kepada penyandang masalah sosial dan korban masalah-masalah lainnya	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	b. Bantuan penyaluran Beras kepada Keluarga Miskin	35	40	40	40	40	40

	Konsultasi																			
11	Peningkatan Potensi Daerah																			
	a. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Daerah	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	b. Pendataan dan Penyusunan Software & Hardware Izin Gangguan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Pembinaan dan Pengawasan PDPK / PD BPR	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	d. Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Dana Bergulir dan Kredit	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	e. Pengembangan dan Fasilitas Penanaman Modal	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	f. Kelahangan Pangan	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	12. Penataan Kinerja dan Organisasi Kehumasan																			
	a. Paparan visualisasi Kabupaten Bogor	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	b. Dialog siaran radio: ragan masalah, saba desa, kuliah subuh	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	c. Dialog interaktif birokrat, pers dan dunia usaha tentang peran	0	125	0	0	125	0	125	0	125	0	125	0	125	0	125	0	125	0	125
	d. Pengadaan sarana visualisasi dan dokumentasi liputan	0	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	e. Jumpa pers	12	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	f. Penyebaran informasi melalui radio diluar jam kerja	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586
	g. Pembuatan buku saku dan buku kaleidoskop	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	h. Visualisasi hasil-hasil pembangunan Kab. Bogor	35	40	40	40	40	40	40	40
	13. Penataan Kelembagaan dan Pedoman Ketatalaksanaan								
	a. Penyusunan pengembangan dan pembentukan organisasi	6	19	0	0	0	0	0	0
	b. Pengkajian pembentukan BUMD	0	0	3	0	0	0	0	0
	c. Penyusunan konsepsi prosedur tetap dokumentasi pelayanan umum	10	10	10	10	10	10	10	10
	d. Penyusunan konsepsi tata naskah dinas OPD	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Pelaksanaan analisis uraian tugas dan jabatan OPD	4	4	4	4	6	6	6	3
	f. Penyusunan standar pelayanan prima	0	23	0	0	0	0	0	0
	14. Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah								
	a. Penyusunan anggaran Setda	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Penatausahaan keuangan Setda	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Penyusunan laporan keuangan Setda	0	1	0	0	0	0	0	0
	d. Penyusunan neraca awal Setda								

15	Badan Perencanaan Daerah								
A	Produk Perencanaan								
	Rencana 5 Tahunan								
	- Renstra (buah)	1	-	-	-	1	-	1	-
	- Rencana Induk Bidang Perencanaan (buah)	5	3	3	3	3	3	3	3
	Rencana Tahunan								
	- Reperada (buah)	-	1	1	1	1	1	1	1
	- AKU (buah)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- S & P (buah)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- RAPPD (buah)	1	1	1	1	1	1	1	1
B	Mekanisme dan Proses Perencanaan Daerah								
	- Forum Perencanaan Desa (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Forum Perencanaan Kecamatan (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Forum Perencanaan Kabupaten (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Safari Informasi Pembangunan (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Survey Usulan (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Survey Penentuan DSP (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Monitoring Pelaksanaan APBD (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
C	Pengendalian Umum Pembangunan Daerah								
	- Evaluasi Kinerja (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1

	- Evaluasi Program dan Kegiatan (kaji)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Penyusunan LPJ Akhir Tahun Anggaran (kaji)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Penyusunan LPJ akhir Masa Jabatan (kaji)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
D	PDP3D atau Bank Data Perencanaan Daerah (unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E	Aplikasi Hasil Libang									
	- Program Imbal Swadaya (konsep)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Program Gerakan Masyarakat Mandiri (konsep)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Program Bersama Memberantas KKN (konsep)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Badan Pengawasan Daerah									
	1. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pemutakhiran									
	a. Berkala (LHP)	299	300	300	300	300	300	300	300	300
	b. Kaji Uji Laporan Unit Kerja (LHP)	94	124	124	124	124	124	124	124	124
	c. Pemutakhiran (LHP)	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	d. Evaluasi Waskat (LHP)	64	62	62	62	62	62	62	62	62
	e. Raksa Desa (LHP)	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	2. Fasilitas Pengawasan Daerah									
	a. Asistensi SAKIP LAKIP (Ang/Org)	2 / 80	1 / 40	-	-	-	-	-	-	-

	b. Forum Pemberanta san KKN (keg)	-	6	6	6	6	6	6	6
	3. Penanganan Kasus-kasus tententu (LHP)	60	55	50	45	40			35
	4. Pemasyarakatan Hasil Pengawasan Daerah (keg)								
	a. Safari Dialogis	11	62	62	62	62	62	62	62
	b. Gelar Pengawasan	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Badan Kepegawaian Daerah								
	1. Diklat PNS Daerah								
	a. Struktural	791	226	117	115	95			92
	b. Fungsional	115	290	380	430	450			480
	c. Substantif	250	440	470	500	510			550
	2. Tersedianya pedoman pola karir PNS (Point)	0	1	1	1	1			1
	3. Terpenuhinya kebutuhan PNS		400	400	400	400			400
	4. Terpenuhinya keseljahteraan PNS								
	a. Bantuan Kesehatan (Rp)	200.000	200.00	200.000	200.000	200.000			200.000
	b. Uang Duka (Rp)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			500.000
	c. Cuti (mg)	4	4	4	4	4			4
	d. Sakit	500/th	500/th	500/th	500/th	500/th			500/th
	5. Terbentuknya kelompok kerja terpadu dalam rangka budaya kerja (unit)	0	25	50	75	100			125
	5. Sosialisasi peraturan disiplin PNS (org)	0	3.000	4.000	5.000	5.000			5.000

2.	Produktivitas Komoditi Unggulan								
	Padi								
	- Padi Sawah (Kw/Ha)	51,65	52,00	52,45	52,75	52,95	53,15		
	- Padi Gogo (Kw/Ha)	25,01	25,14	25,27	25,29	25,35	25,43		
	Palawija								
	- Jagung (Kw/Ha)	28,15	28,57	29,00	29,24	29,35	29,55		
	- Kedele (Kw/Ha)	12,23	12,41	12,60	12,75	12,85	12,98		
	- Kacang Tanah (Kw/Ha)	13,10	13,30	13,50	13,70	13,85	12,95		
	- Ubi Kayu (Kw/Ha)	154,68	157,00	159,36	160,30	160,58	160,85		
	- Ubi Jalar (Kw/Ha)	146,21	148,40	150,63	151,29	152,32	153,22		
	- Talas (Kw/Ha)	90,25	91,32	92,35	93,41	93,82	94,20		
	Sayuran								
	- Petsai (Kw/Ha)	134,22	135,54	136,90	137,15	151,00	166,10		
	- Tomat (Kw/Ha)	100,59	101,55	102,68	103,62	114,00	125,40		
	- Cabe Merah (Kw/Ha)	109,65	110,77	111,93	112,13	123,30	138,00		
	- Bawang Daun (Kw/Ha)	224,91	227,49	229,93	231,05	254,10	279,50		
	- Wortel (Kw/Ha)	507,08	513,02	518,03	523,08	575,30	633,00		
	- Kc. Panjang (Kw/Ha)	95,42	96,39	97,03	98,35	108,10	119,00		
	- Buncis (Kw/Ha)	134,45	135,94	137,28	138,75	153,00	168,30		
	- Keimun (Kw/Ha)	152,38	153,94	155,51	157,82	174,00	191,40		
	- Kangkung (Kw/Ha)	188,71	190,77	192,87	194,56	214,00	235,40		
	- Bayam (Kw/Ha)	77,6	78,03	79,21	79,65	88,00	96,80		

C BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN									
1. Produksi Peternakan									
	- Daging (kg)	43.029.801	47.332.781	52.066.059	57.272.665	62.999.931	69.299.924		
	- Telur (kg)	38.816.301	43.474.257	48.691.168	54.534.108	61.078.201	68.407.586		
	- Susu (Liter)	11.324.992	11.891.241	12.485.804	13.110.094	13.765.598	14.453.878		
2.	Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kapital/hari)	4,07	4,27	4,48	4,71	4,94	5,19		
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis									
	- Rabies (Zoonosis)	0	0	0	0	0	0		
	- Anthrax (Zoonosis)	0	0	0	0	0	0		
	- Brucellosis	20	10	0	0	0	0		
	- SE	0	0	0	0	0	0		
	- ND	0	0	0	0	0	0		
4. Produksi Perikanan									
	- Ikan Konsumsi (Ton)	6.984	7.264	7.554	7.856	8.171	8.498		
	- Ikan Hias (RE)	60.329	64.552	69.070	73.905	79.079	84.614		
	- Benih (RE)	649.744	669.235	689.312	709.992	731.292	753.231		
5. Konsumsi Ikan (kg/kapital/tahun)									
		16,47	16,96	17,47	18,00	18,54	19,09		